

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN

TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan.

Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Kesehatan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kesehatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA / DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Pendapatan
 - 5.2 Belanja
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Operasional
 - 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

- VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas hidup sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan.

Tujuan dari pembangunan kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan menjangkau pelayanan bermutu, secara adil dan merata.

Adapun strategi utama Dinas kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Membangun paradigma sehat berbasis kerakyatan
2. Memberikan hak-hak kesehatan secara berdaulat ke masyarakat dengan fokus pelaksanaan kegiatan berada pada Puskesmas dan Poskesri.
3. Pelaksanaan kegiatan diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program secara bertahap.
4. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat Nagari sebagai pelaku utama.
5. Penyelenggaraan kegiatan lebih mengutamakan proses perubahan perilaku dari pada target angka.
6. Adanya kesepakatan tentang pilihan kegiatan oleh masyarakat nagari bersama unsur kesehatan dan unsur terkait lainnya secara terintegrasi.
7. Bersinergi dengan berbagai unsur dalam merancang dan melaksanakan kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan.

- Pendapatan adalah semua penerimaan kasdaerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan
- tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar).
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2.2.2. BELANJA

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kasda.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain .
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

2.2.3.ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

NO.	Kode Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
	1.02.0.00.0.00.02	Dinas Kesehatan	110,011,721,227.00	96,885,884,658.00	88.07%
1	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,980,000.00	26,360,600.00	77.58%
2	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,514,500.00	11,431,200.00	91.34%
3	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,034,900.00	12,598,000.00	89.76%
4	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,639,500.00	4,707,000.00	61.61%
5	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18,022,100.00	13,327,000.00	73.95%
6	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0.00%
7	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,807,600.00	25,073,000.00	84.12%
8	01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	67,221,949,607.00	65,309,397,115.00	97.15%
9	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76,197,500.00	73,393,500.00	96.32%
10	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,361,500.00	15,043,620.00	91.95%
11	01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	0.00%
12	01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0.00%
13	01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0.00%
14	01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,470,000.00	1,470,000.00	100.00%
15	01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4,720,000.00	4,700,000.00	99.58%
16	01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,750,000.00	905,760.00	32.94%

17	01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	112,542,200.00	59,001,000.00	52.43%
18	01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	0.00%
19	01.2.05.03	Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	30,630,000.00	26,468,000.00	86.41%
20	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,280,000.00	8,969,000.00	79.51%
21	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34,650,000.00	8,537,000.00	24.64%
22	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,523,000.00	9,482,800.00	54.12%
23	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa	3,024,000.00	2,180,000.00	72.09%
24	01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,140,000.00	7,741,100.00	63.77%
25	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,356,000.00	60,900,928.00	84.17%
26	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	0.00%
27	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%
28	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,270,000.00	3,000,000.00	91.74%
29	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155,100,000.00	125,157,864.00	80.69%
30	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,215,440.00	36,192,600.00	99.94%
31	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155,250,000.00	143,104,000.00	92.18%
32	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,690,000.00	44,351,909.00	66.50%
33	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,850,000.00	21,360,000.00	32.44%
34	01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,770,000.00	6,522,000.00	32.99%
35	01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	28,913,250.00	96.38%
36	02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	6,220,889,900.00	5,298,073,616.00	85.17%
37	02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	78,692,000.00	41,291,000.00	52.47%
38	02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	474,679,900.00	440,555,068.00	92.81%
39	02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,510,005,000.00	938,333,500.00	62.14%
40	02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	2,008,678,500.00	1,943,775,000.00	96.77%

		Pelayanan Kesehatan			
41	02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	445,505,100.00	443,536,000.00	99.56%
42	02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2,401,314,425.00	1,549,901,060.00	64.54%
43	02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,575,838,275.00	1,522,218,665.00	96.60%
44	02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8,645,200.00	8,033,000.00	92.92%
45	02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	116,336,800.00	103,850,162.00	89.27%
46	02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	79,594,000.00	65,995,000.00	82.91%
47	02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116,583,100.00	65,636,550.00	56.30%
48	02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2,285,430,500.00	1,550,051,482.00	67.82%
49	02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18,625,000.00	14,960,000.00	80.32%
50	02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26,977,500.00	21,901,000.00	81.18%
51	02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103,501,600.00	53,950,425.00	52.13%
52	02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12,750,000.00	10,405,000.00	81.61%
53	02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25,610,500.00	10,068,400.00	39.31%
54	02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	44,494,400.00	5,274,000.00	11.85%
55	02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	43,937,900.00	12,765,000.00	29.05%
56	02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	41,498,400.00	39,276,800.00	94.65%
57	02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	48,550,900.00	32,728,300.00	67.41%
58	02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	694,415,900.00	319,206,500.00	45.97%
59	02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,144,590,000.00	648,850,000.00	56.69%
60	02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan	722,527,300.00	547,655,521.00	75.80%

		Kesehatan Gizi Masyarakat			
61	02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18,617,000.00	16,718,900.00	89.80%
62	02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	438,620,000.00	326,502,175.00	74.44%
63	02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	328,613,100.00	248,932,825.00	75.75%
64	02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14,931,000.00	12,134,000.00	81.27%
65	02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	890,299,100.00	162,641,600.00	18.27%
66	02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18,996,000.00	3,210,900.00	16.90%
67	02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14,410,500.00	2,171,000.00	15.07%
68	02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Belanja Pegawai	2,217,476,600.00	375,278,600.00	16.92%
69	02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	-	-	0.00%
70	02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81,088,400.00	40,734,800.00	50.24%
71	02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10,817,333,700.00	10,606,282,000.00	98.05%
72	02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	30,402,500.00	13,102,100.00	43.10%
73	02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	0.00%
74	02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	45,378,700.00	31,261,500.00	68.89%
75	02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2,633,067,200.00	1,684,689,888.00	63.98%
76	02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	435,417,000.00	322,526,549.00	74.07%
77	02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	623,484,000.00	-	0.00%
78	02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	0.00%
79	02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	-	0.00%
80	02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	15,226,800.00	11,795,000.00	77.46%
81	02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	21,473,900.00	4,758,910.00	22.16%
82	02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat	11,560,200.00	9,565,000.00	82.74%

		Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			
83	02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	718,739,800.00	174,864,300.00	24.33%
84	03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9,531,100.00	9,122,000.00	95.71%
85	03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4,690,000.00	4,610,000.00	98.29%
86	03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13,915,100.00	11,863,000.00	85.25%
87	03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	767,492,880.00	30,530,002.00	3.98%
88	03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	64,245,700.00	57,226,000.00	89.07%
89	03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	292,460,000.00	199,252,350.00	68.13%
90	04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,449,000.00	19,140,000.00	93.60%
91	04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5,096,100.00	4,714,000.00	92.50%
92	04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	125,701,000.00	105,609,000.00	84.02%
93	04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	86,772,200.00	80,357,000.00	92.61%
94	05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	674,735,900.00	492,294,409.00	72.96%
95	05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30,520,800.00	26,112,555.00	85.56%
96	05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	25,566,000.00	19,305,000.00	75.51%

		Masyarakat (UKBM)			
97	1.02.0.00.0.00.02.0001	Puskesmas Gunung Malintang	979,685,507.00	493,985,425.00	50.42%
98	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	456,050,507.00	159,457,280.00	34.96%
99	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	501,635,000.00	313,528,145.00	62.50%
100	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	22,000,000.00	21,000,000.00	95.45%
101	1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Taram	1,710,269,978.00	830,757,210.00	48.57%
102	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,078,079,978.00	498,720,710.00	46.26%
103	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	609,190,000.00	311,372,500.00	51.11%
104	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	20,664,000.00	89.84%
105	1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Suliki	1,625,865,340.00	938,501,348.99	57.72%
106	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	954,162,340.00	479,863,848.99	50.29%
107	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	631,203,000.00	437,637,500.00	69.33%
108	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	40,500,000.00	21,000,000.00	51.85%
109	1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Situjuh	1,887,784,346.00	826,902,537.00	43.80%
110	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,137,058,346.00	427,267,187.00	37.58%
111	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	727,726,000.00	378,635,350.00	52.03%
112	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
113	1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Rimbo Data	757,370,352.00	386,659,959.00	51.05%
114	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	233,735,352.00	97,264,559.00	41.61%
115	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	475,285,000.00	243,395,400.00	51.21%

		UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
116	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	45,000,000.00	43,000,000.00	95.56%
117	05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,350,000.00	3,000,000.00	89.55%
118	1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Baruah Gunuang	1,103,204,912.00	547,857,910.00	49.66%
119	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	451,037,912.00	166,529,005.00	36.92%
120	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	588,892,000.00	374,928,905.00	63.67%
121	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	56,800,000.00	-	0.00%
122	05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,475,000.00	6,400,000.00	98.84%
123	1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Pangkalan	1,802,667,075.00	1,163,484,559.00	64.54%
124	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,051,941,075.00	650,940,859.00	61.88%
125	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	705,726,000.00	472,543,700.00	66.96%
126	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	45,000,000.00	40,000,000.00	88.89%
127	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Banja Loweh	1,012,344,269.00	599,826,386.00	59.25%
128	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	439,201,169.00	225,948,766.00	51.45%
129	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	550,143,100.00	350,877,620.00	63.78%
130	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00%
131	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Tanjung Pati	3,150,949,959.00	1,413,068,908.00	44.85%
132	01.2.10	Peningkatan Pelayanan	2,281,687,959.00	1,005,253,058.00	44.06%

		BLUD			
133	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	822,969,500.00	376,845,850.00	45.79%
134	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
135	05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23,292,500.00	9,970,000.00	42.80%
136	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Mungo	2,478,014,967.00	1,222,939,429.00	49.35%
137	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,727,288,967.00	819,127,929.00	47.42%
138	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	708,828,500.00	382,811,500.00	54.01%
139	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	36,800,000.00	21,000,000.00	57.07%
140	05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,097,500.00	-	0.00%
141	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Pakan Rabaa	2,420,789,819.00	1,170,548,535.00	48.35%
142	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,630,551,819.00	716,884,109.00	43.97%
143	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	767,238,000.00	432,664,426.00	56.39%
144	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
145	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Piladang	1,147,527,408.00	581,313,346.00	50.66%
146	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	495,360,408.00	238,046,499.00	48.06%
147	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	629,167,000.00	322,266,847.00	51.22%
148	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%

149	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Batu Hampar	2,097,256,912.00	873,594,555.00	41.65%
150	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,425,553,912.00	479,085,555.00	33.61%
151	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	625,703,000.00	352,845,000.00	56.39%
152	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	46,000,000.00	41,664,000.00	90.57%
153	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Halaban	1,509,063,811.00	589,535,265.00	39.07%
154	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	876,873,811.00	279,458,765.00	31.87%
155	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	609,190,000.00	289,076,500.00	47.45%
156	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
157	1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Muaro Paiti	1,800,240,266.00	1,010,658,936.94	56.14%
158	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,049,514,266.00	607,519,886.94	57.89%
159	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	727,726,000.00	380,139,050.00	52.24%
160	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00%
161	1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Sialang	1,360,549,436.00	897,430,503.00	65.96%
162	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	688,883,436.00	424,487,888.00	61.62%
163	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	603,666,000.00	404,942,615.00	67.08%
164	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	68,000,000.00	68,000,000.00	100.00%
165	1.02.0.00.0.00.02.0017	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	3,794,803,249.00	1,165,715,708.00	30.72%
166	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2,886,030,249.00	871,530,708.00	30.20%
167	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	885,773,000.00	273,185,000.00	30.84%

		Daerah Kabupaten/Kota			
168	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
169	1.02.0.00.0.00.02.0018	Puskesmas Dandung-dandung	2,374,533,319.00	982,043,613.00	41.36%
170	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,465,760,319.00	531,918,613.00	36.29%
171	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	863,063,000.00	421,195,000.00	48.80%
172	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
173	05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,710,000.00	7,930,000.00	34.92%
174	1.02.0.00.0.00.02.0019	Puskesmas Mungka	2,237,364,664.00	757,514,494.00	33.86%
175	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,447,126,664.00	460,832,894.00	31.84%
176	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760,338,000.00	296,681,600.00	39.02%
177	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	29,900,000.00	-	0.00%
178	1.02.0.00.0.00.02.0020	Puskesmas Padang Kandis	1,017,382,919.00	485,060,612.87	47.68%
179	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	345,715,919.00	148,938,683.87	43.08%
180	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648,667,000.00	315,121,929.00	48.58%
181	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	23,000,000.00	21,000,000.00	91.30%
182	1.02.0.00.0.00.02.0021	Puskesmas Koto Tinggi	1,498,347,078.00	672,170,816.00	44.86%
183	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	866,157,078.00	321,632,816.00	37.13%
184	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	606,370,000.00	326,614,000.00	53.86%
185	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan	23,000,000.00	22,724,000.00	98.80%

		Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota			
186	05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,820,000.00	1,200,000.00	42.55%
187	1.02.0.00.0.00.02.0022	Puskesmas Maek	1,528,012,994.00	767,708,705.00	50.24%
188	01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	816,217,194.00	390,597,605.00	47.85%
189	02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650,195,800.00	356,111,100.00	54.77%
190	03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	61,600,000.00	21,000,000.00	34.09%
TOTAL			149,305,749,807.00	115,263,163,419.80	77.20%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KENERJA KEUANGAN

3.1.1 Pendapatan.

Pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 terdiri dari:

a. Lain-lain PAD yang Sah

- Jasa Layanan Umum Rp. 950.089.000,-
Jasa Layanan Umum pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang terdapat pada Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola oleh BLUD masing-masing Puskesmas di Dinas Kesehatan.
- Non Kapitasi Rp. 1.775.766.300,-
Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan terdiri dari Jasa Persalinan, Jasa ANC/PNC, KB, Ambulance, Rawat Inap dan Prolanis.
- Kapitasi Rp. 15.584.627.450,-
Kapitasi merupakan pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar.
- Pendapatan BLUD Lainnya Rp. 100.702.802,-
Pendapatan BLUD Lainnya merupakan pendapatan Jasa Giro terhadap Rekening masing-masing BLUD Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Jenis Pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Lain-lain PAD yang Sah	18.770.942.075	18.413.890.790	98,10
Jumlah PAD	18.770.942.075	18.413.890.790	98,10

3.1.2 Belanja.

Pelaksanaan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD. Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kotameliputi belanja pegawai, belanja barang dan Jasa, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2021
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA			
Belanja Operasi	133.124.278.724	110.052.690.047,92	82,67
- Belanja Pegawai	64.529.517.882	63.689.533.012	98,70
- Belanja Barang	68.594.760.842	46.363.157.035,92	67,59
- Belanja Hibah	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi	133.124.278.724	110.052.690.047,92	82,67
Belanja Modal	16.181.471.083	22.828.179.309	79,29
- Belanja Tanah	0	0	0
- Belanja Peralatan dan Mesin	8.244.113.721	6.281.355.261	76,19
- Belanja Gedung dan Bangunan	7.741.157.362	6.363.731.522	82,21
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.200.000	147.446.277	94,40
- Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000	17.975.275	89,88
- Belanja Aset Lainnya	20.000.000	20.000.000	100,00
Jumlah Belanja Modal	30.702.671.179	12.830.508.335	79,29
JUMLAH BELANJA	149.305.749.807	122.883.198.382,92	82,30
SURPLUS / (DEFISIT)	(130.534.807.732)	(104.469.307.592,92)	80,03

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 122.883.198.382,92,-. Jumlah tersebut mencapai 82,30% dari total anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 149.305.749.807,-. Pada Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 133.124.278.724,- terealisasi sebesar Rp. 110.052.690.047,92,- atau sebesar 82,67%, yang terdiri dari belanja pegawai APBD sebesar Rp. 62.004.911.012,- dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 1.684.622.000,- atau sebesar 98,70% dan belanja barang yang dianggarkan sebesar Rp. 68.594.760.842,- terealisasi sebesar Rp. 46.363.157.035,92,- terdiri dari belanja barang APBD sebesar Rp. 34.041.316.924,- dan belanja barang BLUD sebesar Rp. 12.321.840.111,92,- atau sebesar 67,59%. Pada Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 16.181.471.083,- terealisasi sebesar Rp. 12.830.508.335,- terdiri dari Belanja Modal APBD sebesar Rp. 3.400.743.073,- dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp. 9.429.765.262,- atau sebesar 79,29%.

Adapun rincian Belanja Modal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 8.244.113.721,- terealisasi sebesar Rp. 6.281.355.261,- atau sebesar 76,19 %, terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.000.000.000	1.936.825.000
2.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	450.000.000	433.257.000
3.	Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	175.000.000	25.000.000
4.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	42.000.000	40.740.000
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	775.860.000	753.768.500
9.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	175.000.000	152.700.000
10.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	69.500.000	60.352.000
11.	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	4.163.558.721	2.878.712.761

- b. Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 7.741.157.362,- terealisasi sebesar Rp. 6.363.731.522,- atau sebesar 82,21% terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	609.200.000	600.960.522
2.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.988.783.000	5.084.453.662
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.123.174.362	678.317.338

- c. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp. 156.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 147.446.277,- yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	136.200.000	127.571.575
2.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	20.000.000	19.874.702

- d. Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.975.275,- atau sebesar 89,88% terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000	17.975.275

- e. Belanja Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100% terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	20.000.000	20.000.000

Terdapat defisit dari anggaran pendapatan dan belanja sebesar (104.469.307.592,92,-) atau sebesar 80,03% dari jumlah anggaran sebesar (130.534.807.732,-).

3.13 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75% diantaranya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 7.639.500	Rp 4.707.000	61,61

- a. Realisasi Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar 61,61% disebabkan karena Belanja lembur yang tidak terealisasi.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 13.327.000	Rp 4.695.100	73,95

- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP sebesar 73,95 karena belanja perjalanan dinas yang tidak cair seluruhnya.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	Rp 2.750.000	Rp 905.760	32,94

- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebesar 32,94 % dikarenakan kegiatan untuk pertemuan double penganggaran.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 112.542.200	Rp 59.001.000	52,43

- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 52,43% karena untuk kegiatan honor yang tidak terealisasi. Honor Pengurus Barang Puskesmas tersebut sudah dianggarkan di kegiatan gaji dan tunjangan.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 34.650.000	Rp 8.537.000	24,64

- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sebesar 24,64% karena belanja makan minum rapat yang tidak cair disebabkan adanya pandemi covid -19

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 17.523.000	Rp 9.482.800	54,12

- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 54,12 % disebabkan karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada bidang-bidang akibat pandemi covid -19.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.024.000	Rp 2.180.000	72,09

- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 72,09% disebabkan karena belanja pembelian majalah tidak terealisasi.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 12.140.000	Rp 7.741.100	63,77

- h. Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi sebesar 63,77 % disebabkan karena kondisi pandemi virus corona diases 19.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 66.690.000	Rp 44.351.909	66,50

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena kendaraan dalam kondisi baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 65.850.000	Rp 21.360.000	32,44

- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar 32,44% karena Sebagian dana dari kegiatan tersebut sudah dianggarkan di dana BLUD masing-masing Puskesmas.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.522.000	Rp 13.248.000	32,99

- k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 32,99% disebabkan karena belanja service computer tidak terlaksana.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 41.291.000	Rp 37.401.000	52,47

1. Rehab dan Pemeliharaan Puskesmas terealisasi sebesar 52,47% karena pemeliharaan puskesmas juga sudah dianggarkan di dana BLUD masing-masing Puskesmas.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.510.005.000	Rp 938.333.500	62,14

- m. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar 62,14% karena terlambatnya Surat Keputusan penunjukan pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan sehingga pengadaan bisa dilaksanakan pada trimester empat.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.510.005.000	Rp 938.333.500	62,14

- n. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar 62,14% karena terlambatnya Surat Keputusan penunjukan pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan sehingga pengadaan bisa dilaksanakan pada trimester empat.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Obat dan Vaksin	Rp 2.401.314.425	Rp 1.549.901.060	64,54

- o. Pengadaan Obat dan Vaksin terealisasi sebesar 64,54% karena terlambatnya Surat Keputusan penunjukan pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan sehingga pengadaan bisa dilaksanakan pada trimester empat.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 116.583.100	Rp 65.636.550	56,30

- p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil terealisasi sebesar 56,30 % disebabkan karena kasus ibu dan anak terkonfirmasi covid tidak banyak sehingga belanja bimtek tidak terlaksana.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 2.285.430.500	Rp 1.550.051.482	67,82

- q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin terealisasi sebesar 67,82% disebabkan karena pencairan dana hanya sesuai jumlah pemakai manfaat persalinan jampersal.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 103.501.600	Rp 53.950.425	52,13

- r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar 52,13% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 25.610.500	Rp 10.068.400	39,31

- s. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 39,31% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Rp 44.494.400	Rp 5.274.000	11,85

- t. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes sebesar 11,85% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 43.937.900	Rp 12.765.000	29,05

- u. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan jiwa berat terealisasi sebesar 29,05% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terinfeksi HIV	Rp 48.550.900	Rp 32.728.300	67,41

- v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV terealisasi sebesar 67,41% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Rp 694.415.900	Rp 319.206.500	45,97

- w. Pengeloaan Pelayanan Kesehtan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa terealisasi sebesar 45,97% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis kesehatan	Rp 1.144.590.000	Rp 648.850.000	56,69

- x. Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan terealisasi sebesar 56,69% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 438.620.000	Rp 326.502.175	74,44

- y. Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan terealisasi sebesar 74,40% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa	Rp 18.996.000	Rp 3.210.900	16,90

- z. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kesehatan jiwa sebesar 16,90% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 14.410.500	Rp 2.171.000	15,07

- aa. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza terealisasi sebesar 15,07% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Belanja Pegawai	Rp 2.217.476.600	Rp 375.278.600	16,92

- bb. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan khusus belanja pegawai terealisasi sebesar 16,92% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Rp 81.088.400	Rp 40.734.800	50,24

- cc. Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular terealisasi sebesar 50,25% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA	Rp 30.402.500	Rp 13.102.100	43,10

- dd. Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes tidak terealisasi sebesar 43,10% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Rp 45.378.700	Rp 31.261.500	68,89

ee. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat terealisasi sebesar 68,89% disebabkan karena

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Operasioanal Pelayanan Puskesmas	Rp 2.633.067.200	Rp 1.684.689.888	63,98

ff. Operasional pelayanan puskesmas terealisasi sebesar 63,98% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Operasional Pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Rp 435.417.000	Rp 322.526.549	74,07

gg. Operasional pelayanan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya sebesar 74,07% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
.				
1.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 21.473.900	Rp 4.758.910	22,16

hh. Pengelolaan sistem informasi kesehatan sebesar 22,16% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Rp 718.739.800	Rp 174.864.300	24,33

ii. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sebesar 24,33% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar	Rp 767.492.880	Rp 30.530.002	3,98

jj. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar sebesar 3,98% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 292.460.000	Rp 199.252.350	68,13%

kk. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 68,13% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Rp 674.735.900	Rp 492.294.409	72,96%

ll. Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat sebesar 72,96% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Koto Baru Simalanggang	Rp 885.773.000	Rp 273.185.000	30,84%
2.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Batu Hampar	Rp 625.703.000	Rp 352.845.000	56,39%
3.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Piladang	Rp 629.167.000	Rp 322.266.847	51,22%
4.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Mungo	Rp 708.828.500	Rp 382.811.500	54,01%
5.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Halaban	Rp 609.190.000	Rp 289.076.500	47,45%
6.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Pakan Rabaa	Rp 767.238.000	Rp 432.664.426	56,39%
7.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Situjuh	Rp 727.726.000	Rp378.635.350	52,03%
8.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Taram	Rp 609.190.000	Rp 311.372.500	51,11%
9.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Tanjung Pati	Rp 822.969.500	Rp 376.845.850	45,79%
10.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Dangung2	Rp 863.063.000	Rp 421.195.000	48,80%
11.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Padang Kandis	Rp 648.667.000	Rp 315.121.929	48,58
12.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Mungka	Rp 760.338.000	Rp 296.681.600	39,02%

13.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Suliki	Rp 631.203.000	Rp 437.637.500	69,33%
14.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Maek	Rp 650.195.800	Rp 356.111.100	54,77%
15.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Bj. Loweh	Rp 550.143.100	Rp 350.877.620	63,78%
16.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Kt. Tinggi	Rp 606.370.000	Rp 326.614.000	53,86%
17.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. M. Paiti	Rp 727.726.000	Rp 380.139.050	52,24%
18.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Rb. Data	Rp 475.285.000	Rp 243.395.400	51,21%
19.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Gunung Malintang	Rp 501.635.000	Rp 313.528.145	62,50%
20.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Baruah Gunuang	Rp 588.892.000	Rp 374.928.905	63,67%
21.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Pangkalan	Rp 705.726.000	Rp 472.543.700	66,96%
22.	Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Pusk. Sialang	Rp 603.666.000	Rp 404.942.615	67,08%

mm. BOK Pada Puskesmas

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas terealisasi di bawah 75% disebabkan karena juknis BOK baru keluar pada bulan juni sehingga harus melakukan pergeseran pada anggaran.

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Koto Baru Simalanggang	Rp 2.886.030.249	Rp 871.530.708	30,20%
2.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Batu Hampar	Rp 1.425.553.912	Rp 479.085.555	33,61%
3.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Piladang	Rp 495.360.408	Rp 238.046.499	48,06%
4.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Mungo	Rp 1.727.288.967	Rp 819.127.929	47,42%
5.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Halaban	Rp 876.873.811	Rp 279.458.765	31,87%
6.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Pakan Rabaa	Rp 1.630.551.819	Rp 716.884.109	43,97%
7.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Situjuh	Rp 1.137.058.346	Rp 427.267.187	37,58%
8.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Taram	Rp 1.078.079.978	Rp 498.720.710	46,26%
9.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Tanjung Pati	Rp 2.281.687.959	Rp 1.005.253.058	44,06%
10.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Dangung ²	Rp 1.465.760.319	Rp 531.918.613	36,29%
11.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Padang Kandis	Rp 345.715.919	Rp 148.938.683,87	43,08%
12.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Mungka	Rp 1.447.126.664	Rp 460.832.894	31,84%
13.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Suliki	Rp 954.162.340	Rp 479.863.848,99	50,29%
14.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Maek	Rp 816.217.194	Rp 390.597.605	47,85%
15.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Bj. Loweh	Rp 439.201.169	Rp 225.948.766	51,45%
16.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Kt. Tinggi	Rp 866.157.078	Rp 321.632.816	37,13%
17.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. M. Paiti	Rp 1.049.514.266	Rp 607.519.886,94	57,89%
18.	Peningkatan Pelayanan BLUD Pusk. Rb. Data	Rp 233.735.352	Rp 97.264.559	41,61%

19.	Peningkatan Pelayanan Pusk. Malintang	BLUD Gunung	Rp 456.050.507	Rp 159.457.280	34,96%
20.	Peningkatan Pelayanan Pusk. Gunuang	BLUD Baruah	Rp 451.037.912	Rp 166.529.005	36,92%
21.	Peningkatan Pelayanan Pusk. Pangkalan	BLUD	Rp 1.051.941.075	Rp 650.940.859	61,88%
22.	Peningkatan Pelayanan Pusk. Sialang	BLUD	Rp 688.883.436	Rp424.487.888	61,62%

nn. Peningkatan Pelayanan BLUD

Peningkatan pelayanan BLUD terealisasi di bawah 75% disebabkan karena Masih berlanjutnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun 2021 menyebabkan semua kegiatan yang bersifat menghadirkan peserta yang banyak tidak dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjaawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.
- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

4.2 Kebijakan Kapitalisir

- (1) Pengeluaran anggaran untuk belanja barang akan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal apabila:
- a. Barang yang dibeli memberi manfaat lebih dari satu tahun.
 - b. Pembelian barang tersebut tidak bersifat rutin.
 - c. Harga Barang tersebut sama atau lebih dari Rp. 500.000,- per satuan barang
- (2) Pengeluaran untuk belanja pemeliharaan yang sifatnya *tidak rutin dan memberikan mamfaat lebih satu periode akuntansi* akan dikapitalisir apabila melebihi jumlah untuk masing belanja pemeliharaan sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan	Jumlah
Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp 10.000.000
Belanja Pemeliharaan Jembatan	Rp 10.000.000
Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor	Rp 10.000.000

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- 1. Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- 3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 1. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

3. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

5. Peralatan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

7. Asset Tetap Lainnya

Asset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Asset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Asset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap baru.

8. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi asset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatn-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang , dan menjadi hak pemerintah tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, criteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di PPKD dan SKPD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)
5.1.1	PENDAPATAN	18.413.890.790	18.989.652.695
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0
b.	Lain-lain PAD yang Syah	18.413.890.790	18.989.652.695
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan	950.089.000	1.613.038.084
-	Setoran Klaim Jampersal	1.775.766.300	1.824.346.455
-	Setoran BPJS	15.584.627.450	15.461.953.837
-	Pendapatan BLUD Lainnya	103.408.040	90.314.319

Jumlah realisasi pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp. 18.413.890.790,- merupakan lain-lain pendapatan yang syah atas Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada Tahun 2020 realisasi pendapatan sebesar Rp. 18.989.652.695,- terdiri atas:

-	Jasa Layanan Umum	Rp.1.613.038.084,-
-	Non Kapitasi	Rp. 1.824.346.455,-
-	Kapitasi	Rp. 15.461.953.837,-
-	Pendapatan Jasa Lainnya	<u>Rp. 90.314.319,-</u>
	Jumlah	Rp. 18.989.652.695,-

5.	BELANJA	Realisasi 2021	Realisasi 2020
5.1	Belanja Operasi	110.052.690.047,92	102.620.961.338,37
5.1.1	Belanja Pegawai	63.689.533.012,00	56.367.476.959

Jumlah tersebut merupakan Realisasi Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2021. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri atas :

Gaji dan Tunjangan	49.801.029.642	45.960.642.971
Tambahan Penghasilan Pegawai	10.970.936.370	10.406.833.988
Tambahan Penghasilan		
Berdasarkan	1.475.980.000	0
Pertimbangan Objektif Lainnya	1.213.145.000	0
ASN	1.684.622.000	0
Honorarium		
Pegawai BLUD		

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.363.157.035,92	46.253.484.379,37

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan 2020, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mencapai 67,59% dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

- Belanja Bahan Habis Pakai	2.476.553.534	2.476.553.534
- Belanja Barang Pakai Habis	6.471.083.290	
- Belanja Bahan / Material	0	3.101.145.888
- Belanja Jasa Kantor	12.444.005.835	10.057.948.229
- Belanja Premi Asuransi	10.582.933.300	11.934.630.600
- Belanja Perawatan	0	74.991.771
- Kendaraan Bermotor	9.100.000	0
- Belanja Sewa Peralatan dan		
- Mesin	45.600.000	0
- Belanja Sewa Gedung dan		
- Bangunan		
- Belanja Cetak dan	0	426.480.609
- Penggandaan		
- Belanja Makan dan Minum	0	1.060.462.000
- Biaya Pakaian Dinas	0	
- Biaya Pakaian Kerja	0	0
- Belanja Perjalanan Dinas	1.696.026.604	3.758.691.000
- Belanja Pemeliharaan	177.119.245	33.389.000
- Belanja Kursus, Pelatihan,	2.526.548.650	36.425.000
- Sosialisasi		
- Honorarium PNS	0	472.025.000
- Honorarium Non PNS	0	132.770.800

- Belanja Uang dan atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.900.000	0
- Belanja Barang/Jasa BLUD		12.434.939.388,37
Sub Jumlah	46.363.157.035,92	46.253.484.379,37

5.2 Belanja Modal. 12.830.508.335 22.828.179.309

Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 12.830.508.335,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.181.471.083,- atau sebesar 79,29% dari dana yang dianggarkan, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 22.828.179.309,-

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.281.355.261 7.182.539.947

Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 dan 2020. Untuk Tahun 2021 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 76,19% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 8.244.113.721,-.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor	433.257.000	2.687.771.000
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat pengolah Air Kotor	1.936.825.000	2.550.000
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0	651.460.540
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000	0
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.740.000	0
4.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	152.700.000	333.915.142

5.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	753.768.500	2.150.224.035
6.	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	0	1.356.619.230
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.878.712.761	0
Total		6.281.355.261	2.341.344.838

5.2.3 Belanja Modal Gedung

6.363.731.522 10.886.236.999

Dan Bangunan

Merupakan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020. Untuk Tahun 2021 realisasi belanja Modal sebesar Rp. 6.363.731.522,- mencapai 82,21% dari Jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 7.741.157.362,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.960.522	0
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.084.453.662	10.886.236.999
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	678.317.338	0
Total		6.363.731.522	967.741.593

5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi

147.446.277

0

Dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar 147.446.277 merupakan realisasi yang terdiri dari :

- Belanja Penampungan Sampah 127.571.575,-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 19.874.702,-

Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.975.275	4.759.402.363
---	-------------------	----------------------

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp. **17.975.275,-** merupakan Realisasi Belanja Modal BLUD yang terdiri dari pengadaan aplikasi system pendaftaran pasien Puskesmas Tanjung Pati.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp. **4.759.402.363,-** merupakan Realisasi Belanja Modal BLUD yang terdiri dari :

a. Peralatan Mesin	Rp. 3.709.827.664,89
b. Gedung dan Bangunan	Rp. 983.184.356,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 13.128.280,00
d. Tidak Dikapitalisir	Rp. 53.262.062,11

5.2.6 Belanja Modal Aset lainnya	20.000.000	0
---	-------------------	----------

Realisasi Belanja modal asset lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- merupakan realisasi belanja modal yang berasal dari dana BLUD berupa pengadaan teralis Puskesmas Koto Tinggi.

Pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi belanja modal asset lainnya.

5.2 Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Neraca Dinas kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 memiliki Total Asset sebesar Rp. 102.601.682.075,42,-. Total Kewajiban sebesar Rp. 52.997.850,- dan Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 102.548.684.225,42,-.

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.1	Aset Lancar	13.641.293.663,51	11.707623.434,35
5.2.1.1	Kas di Bendahara Penerima	0	0

Penerimaan Daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, dana Non Kapitasi dan Kapitasi JKN yang dikelola oleh BLUD Puskesmas se Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat kas di bendahara penerima.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.1.2	Kas di Bendh. Pengeluaran	43.677.820,-	0,-

Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 43.677.820 yang disebabkan karena keterlambatan penyetoran UYHD. Kas di bendahara pengeluaran tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Januari 2022 (STS Terlampir).

Pada tanggal 31 Desember 2020 tidak terdapat kas di bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.1.3	Kas di BLUD	5.825.595.206,71	5.033.046.604,63

Kas di BLUD merupakan sisa pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari 22 Puskesmas yaitu :

No.	Puskesmas	Jumlah
1.	Koto Tinggi	179.487.631,00
2.	Suliki	125.061.406,01
3.	Baruah Gunung	95.622.219,00
4.	Banja Loweh	61.931.408,00
5.	Maek	180.851.572,00
6.	Padang Kandis	71.435.214,77
7.	Dangung-dangung	328.926.556,00
8.	Mungka	352.321.762,00
9.	Koto Baru Simalanggang	1.266.153.445,00
10.	Batu Hampar	531.993.979,30
11.	Piladang	81.496.747,00
12.	Mungo	402.081.952,07
13.	Pakan Rabaa	592.105.528,00

No	Puskesmas	Jumlah
14.	Situjuh	216.324.709,00
15.	Halaban	297.371.069,00
16.	Taram	189.402.885,00
17.	Tanjung Pati	507.309.681,50
18.	Pangkalan	33.954.035,00
19.	Rimbo Data	32.772.633,00
20.	Gunung Malintang	75.571.365,00
21.	Muaro Paiti	174.226.035,06
22.	Sialang	29.193.374,00

Kas di BLUD merupakan sisa pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang terdiri dari 22 Puskesmas yaitu :

No.	Puskesmas	Jumlah
1.	Koto Tinggi	200.967.318
2.	Suliki	138.454.389
3.	Baruah Gunung	76.256.789
4.	Banja Loweh	56.511.387
5.	Maek	146.907.794
6.	Padang Kandis	51.561.580,83
7.	Dangung-dangung	230.425.629
8.	Mungka	403.191.378
9.	Koto Baru Simalanggang	903.752.199
10.	Batu Hampar	482.881.906,30
11.	Piladang	64.432.782
12.	Mungo	283.750.215
13.	Pakan Rabaa	642.668.533
14.	Situjuh	218.306.486
15.	Halaban	246.327.807
16.	Taram	126.773.410
17.	Tanjung Pati	537.785.904,50
18.	Pangkalan	36.826.531
19.	Rimbo Data	20.405.566
20.	Gunung Malintang	55.346.861
21.	Muaro Paiti	83.744.622
22.	Sialang	38.972.480
Total		5.046.251.567,63

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.1.3.02	Piutang Retribusi	0	0

Tidak terdapat piutang retribusi pada tahun 2021 dan 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Syah	111.756.320	354.748.500

Terdapat piutang lain-lain PAD yang Syah pada tahun 2021 sebesar Rp. 111.756.320,- dimana piutang tersebut merupakan piutang non kapitasi Puskesmas yang terdiri dari :

No	Puskesmas	Bulan Pelayanan	Jumlah
1.	Banja Loweh	Desember	Rp. 1.280.000
2.	Taram	Desember	Rp. 4.960.000
3.	Pakan Rabaa	Desember	Rp. 6.155.000
4.	Halaban	Desember	Rp. 2.100.000
5.	Gunung Malintang	Desember	Rp. 2.918.000
6.	Batu Hampar	Desember	Rp. 3.690.000
7.	Situjuh	Desember	Rp. 6.305.000
8.	Dangung-dangung	Oktober	Rp. 432.040
		November	Rp. 1.443.640
		Desember	Rp. 8.527.640
9.	Tanjung Pati	Desember	Rp. 5.130.000
10.	Rimbo Data	Desember	Rp. 4.225.000
11.	Pangkalan	Desember	Rp. 7.692.000
12.	Koto Baru Simalanggang	Desember	Rp. 7.840.000
13.	Maek	Desember	Rp. 8.019.000
14.	Padang Kandis	Desember	Rp. 700.000
15.	Muaro Paiti	Desember	Rp. 15.719.000
16.	Suliki	Desember	Rp. 1.215.000
17.	Mungo	November	Rp. 8.525.000
		Desember	Rp. 2.500.000
18.	Sialang	November	Rp. 4.715.000
		Desember	Rp. 7.665.000
Total			Rp. 111.756.320

Pada tahun 2020 terdapat Piutang Lain-lain PAD yang Syah sebesar Rp. 354.748.500,-

No	Puskesmas	Bulan Pelayanan	Jumlah
1.	Banja Loweh	Oktober	Rp. 2.327.100
		November	Rp. 1.357.100
		Desember	Rp. 2.677.100
2.	Taram	Oktober	Rp. 5.015.000
.		November	Rp. 7.770.000
		Desember	Rp. 8.965.000
3.	Pakan Rabaa	Oktober	Rp. 4.075.000
		November	Rp. 7.930.000
4.	Mungka	Oktober	Rp. 260.000
		November	Rp. 1.760.000
		Desember	Rp. 2.075.000
5.	Halaban	Oktober	Rp. 3.527.000
		November	Rp. 2.417.000
6.	Gunung Malintang	Oktober	Rp. 3.100.000
		November	Rp. 4.026.000
		Desember	Rp. 3.067.000
7.	Batu Hampar	Oktober	Rp. 5.110.000
		November	Rp. 4.290.000
		Desember	Rp. 7.405.000
8.	Situjuh	Oktober	Rp. 7.030.000
		November	Rp. 5.489.000
		Desember	Rp. 9.880.000
9.	Dangung-dangung	Oktober	Rp. 4.200.000
		November	Rp. 3.600.000
		Desember	Rp. 6.300.000
10.	Piladang	Oktober	Rp. 1.240.000
		November	Rp. 4.775.000
		Desember	Rp. 3.175.000
11.	Tanjung Pati	Oktober	Rp. 12.015.000
		November	Rp. 3.050.000
12.	Rimbo Data	Oktober	Rp. 2.447.100
		November	Rp. 697.100

13.	Baruah Gunung	Oktober	Rp. 4.295.000
		November	Rp. 2.355.000
		Desember	Rp. 6.375.000
14.	Pangkalan	Oktober	Rp. 9.368.000
		November	Rp. 6.786.000
15.	Koto Baru Simalanggang	Oktober	Rp. 14.455.000
		November	Rp. 12.655.000
		Desember	Rp. 12.275.000
Total			Rp. 354.748.500

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Retribusi	0	0

Tidak terdapat penyisihan piutang retribusi pada tahun 2020 dan Tahun 2019.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Syah	(558.781,60)	(1.773.742,50)

Terdapat penyisihan piutang lain-lain PAD yang syah pada tahun 2021 (Rp. 558.781,60) yang merupakan penyisihan piutang dari dana non kapitasi BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 111.756.320,-

Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 sebesar (Rp. 1.772.742,50) yang merupakan penyisihan piutang dari dana Non Kapitasi BLUD Puskesmas sebesar Rp. 354.748.500,-

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.1.5	Persediaan	7.660.823.098,40	6.452.774.594,22

Terdapat persediaan akhir Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan dan Intalasi Farmasi Kabupaten serta Puskesmas se-Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp. 7.660.823.098,40 dengan perincian sebagai berikut :

- Obat-obatan (APBD) Rp. 6.525.096.155,86

a. Persediaan yang berasal dari dana APBD

- Persediaan ATK Rp. 91.911.701,00
- Alat Listrik Rp. 4.561.000,00
- Alat Kebersihan Rp. 6.427.700,00
- Alat Dokter Pakai Habis Rp. 145.528.425,00
- Cetak Rp. 3.080.000,00
- Barang Pakai Habis Rp. 25.000.000,00
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Rp. 342.459.607,99
- Barang BTT Penanggulangan Covid -19 Rp. 91.613.141,00

Persediaan yang berasal dari dana BLUD

- Bahan Dokter Habis Pakai Rp. 84.270.384,55
- Persediaan ATK Rp. 228.279.771,00
- Alat Kebersihan Rp. 33.117.494,00
- Alat Labor Habis Pakai Rp. 26.619.056,00
- Logistik Kantor Rp. 1.304.900,00
- Alat Listrik Rp. 12.854.352,00
- Cetak Rp. 21.638.975,00
- Materai Rp. 300.000,00
- Alat Dapur Rp. 1.031.500,00
- Kelengkapan Komputer Rp. 200.000,00
- Obat dan Bahan Habis Pakai Rp. 15.548.935,00
- Jumlah Rp. 425.165.367,55**

Terdapat persediaan akhir Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan dan Intalasi Farmasi Kabupaten serta Puskesmas se-Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp. 6.452.774.594,22 dengan perincian sebagai berikut :

- Obat-obatan (APBD) Rp. 4.514.214.353,12

a. Persediaan yang berasal dari dana APBD

- Persediaan ATK	Rp.	44.113.954,00
- Alat Listrik	Rp.	381.000,00
- Alat Kebersihan	Rp.	10.500.450,00
- Alat Dokter Pakai Habis	Rp.	14.426.727,00
- Cetak	Rp.	4.884.050,00
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	<u>Rp.</u>	<u>882.475.453,10</u>
Jumlah	Rp.	4.737.887.152,15

b. Persediaan yang berasal dari dana BLUD

- Bahan Dokter Habis Pakai	Rp.	20.403.568,00
- Persediaan ATK	Rp.	159.493.097,00
- Alat Kebersihan	Rp.	20.403.568,00
- Logistik Kantor	Rp.	2.119.600,00
- Alat Listrik	Rp.	7.843.000,00
- Cetak	Rp.	854.000,00
Jumlah	Rp.	213.722.915,00

c. Persediaan dari dana BOK

- Persediaan ATK	Rp.	78.495.000,00
- Materai	Rp.	2.067.000,00
- Alat Kebersihan	Rp.	3.970.000,00
- Alat Dokter Pakai Habis	Rp.	67.801.800,00
- Cetak	<u>Rp.</u>	<u>23.573.200,00</u>
Jumlah	Rp.	175.907.375,00

d. Persediaan dari Dana BTT

- Alat Dokter Pakai Habis	Rp.	528.693.317,00
---------------------------	-----	----------------

e. Persediaan dari Dana Hibah BTT

- Alat Dokter Pakai Habis	Rp.	63.455.000,00
---------------------------	-----	---------------

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.2	Aset Tetap	87.188.699.214,23	84.951.693.640,74
5.2.2.1	T a n a h	2.413.401.700,00	2.278.928.350

Tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2021 bertambah sebesar Rp. 134.473.350,- sehingga Total tanah pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.413.401.700,-. Penambahan tersebut dikarenakan adanya penilaian dari Puskesmas, Pustu dan Poskesri di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya :

- Puskesmas Baruah Gunung	35.000.000,00
- Pustu Pauh Baruah Gunung	793.800,00
- Poskesri Parantian (Kubu Baru)	1.200.000,00
- Poskesri Banda Rait	728.000,00
- Poskesri Botuang	2.940.000,00
- Poskesri Batu Balabuah I	1.750.000,00
- Poskesri Batu Balabuah II	2.252.250,00
- Poskesri Kampung Baru	1.372.800,00
- Pustu Soriak	416.500,00
- Puskesmas Mongan	1.680.000,00
- Puskesmas Rimbo Data	33.550.000,00
- Poskesri Cinta Maju	2.000.000,00
- Poskesri Simpang Tigo	735.000,00
- Poskesri Koto Tangah Galugua	990.000,00
- Polindes Kp. Baru	4.560.000,00
- Poskesri Lubuak Koto Sialang	1.000.000,00
- Poskesri Seberang Pasar Manggilang	4.560.000,00
- Poskesri Panang	2.625.000,00
- Puskesmas Aia Angek Koto Tinggi	34.320.000,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.2.	Peralatan dan Mesin	76.377.502.441,71	69.993.631.201,71

Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 76.377.502.442,71 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 69.993.631.201,71 sehingga terdapat penambahan aset pada peralatan mesin sebesar Rp. 6.383.871.240 Penambahan tersebut terdiri dari :

a. Mutasi Tambah :

- Belanja Modal Peralatan Mesin 2021	Rp. 6.281.355.261,-
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.671.400,-
- Hibah dari Kemenkes	Rp. 414.739.630,-
- Reklas Masuk dari Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 3.400.000,-</u>

Jumlah Rp. 6.708.166.291,-

b. Mutasi Kurang :

BM Tidak Dikapitalisir	Rp. 50.347.621,00
- Mutasi Keluar ke SEKDA	Rp. 3.000.000,00
- Mutasi ke Ekstrakom	Rp. 270.051.180,00
- Koreksi Saldo awal Ekstrakom	<u>Rp. 896.250,00</u>

Jumlah Rp. 324.295.051,00

Total Rp 6.383.871.240,00

Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp. 6.281.355.261,- terdiri dari :

- Belanja Modal Ambulance	Rp. 433.257.000,-
- Belanja Modal Pengadaan (IPAL)	Rp. 1.937.367.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp. 728.049.845,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	Rp. 2.045.508.014,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	Rp. 6.520.538,-
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp. 1.072.751.884,-
- Belanja Modal Alat Studio Komunikasi	Rp. 42.417.630,-
- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp. 15.483.350,-

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 8.671.400,- merupakan belanja Pengadaan ENT Instrumen Set yang bersumber dari dana BLUD pada Puskesmas Muaro Paiti.

Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 414.739.630,-, merupakan belanja hibah yang terdiri dari :

- KIT UKS	Rp. 9.932.340,-
- Lansi Kit	Rp. 182.599.285,-
- Vaksin Refrigerator	Rp. 47.190.000,-
- Thermogun	Rp. 175.018.005,-

Reklas Masuk dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.400.000,- merupakan tiang bendera Puskesmas Koto Tinggi yang berasal dari dana BLUD Puskesmas.

Mutasi Keluar ke Sekda Sebesar Rp. 3.000.000,- merupakan pengadaan Thermogun oleh Dinas Kesehatan sebanyak 3 unit.

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar 50.347.621 merupakan belanja modal yang bersumber dari dana BLUD yang terdiri dari belanja modal alat kantor rumah tangga, alat kedokteran dan kelengkapan computer.

Koreksi ekstrakom sebesar Rp. 896.250,-

Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 69.992.131.201,71 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 58.096.606.562,67 sehingga terdapat penambahan aset pada peralatan mesin sebesar Rp. 11.895.524.639,04. Penambahan tersebut terdiri dari :

a. Mutasi Tambah :

- Belanja Modal Peralatan Mesin 2020	Rp. 7.182.539.947,-
- Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	Rp. 400.000,-
- Mutasi tambah dari Belanja BTT	Rp. 1.713.524.800,-
- Hibah dari Baznas	Rp. 28.070.000,-
- Reklas Masuk dari ATL	<u>Rp. 3.709.827.664,89</u>
Jumlah	Rp.12.634.362.411,89

b. Mutasi Kurang :

- Reklas Keluar ke JIJ	Rp. 12.177.000,00
- BM Tidak Dikapitalisir	Rp. 121.541.914,00
- Penghapusan	Rp. 84.000.000,00
- Mutasi Keluar ke SEKDA	Rp. 258.556.880,00
- Mutasi ke Ekstrakom	<u>Rp. 262.561.978,85</u>
Jumlah	<u>Rp. 738.837.772,85</u>
Total	Rp11.895.524.639,04

Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 7.182.539.947,- terdiri dari :

- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 2.687.771.000,-
- Belanja Modal Pengadaan (IPAL) Rp. 2.550.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Genset Rp. 651.460.540,-
- Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit / Jaringan Rp. 333.915.142,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum Rp. 2.150.224.035,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air Rp. 1.257.632.200,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Rp. 98.987.030,-

Kapitalisasi dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 400.000 merupakan belanja Honor Pejabat Pengadaan Alat Kedokteran yang bersumber dari dana BLUD pada Puskesmas Pangkalan.

Mutasi Tambah dari belanja BTT sebesar Rp. 1.713.524.800,- merupakan belanja BTT Satgas Covid -19 yang terdiri dari :

- Alat Angkut Rp. 970.000.000,-
- Alat Kantor Lainnya Rp. 78.000.000,-
- Alat Rumah Tangga Rp. 173.700.000,-
- Pengadaan Komputer Rp. 63.445.000,-
- Alat Kedokteran Rp. 402.548.800,-
- Alat Kesehatan Rp. 21.600.000,-
- Alat Studio dan Komunikasi Rp. 5.071.000,-
- Jumlah Rp. 1.713.524.800

Hibah dari Baznas sebesar Rp. 28.070.000,- merupakan belanja hibah yang terdiri dari :

- Alat Kedokteran Rp. 16.500.000,-
- Alat Pertanian Rp. 11.155.000,-
- Alat Kantor Rumah Tangga Rp. 415.000,-
- Jumlah Rp. 28.070.000,-

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.709.827.664,89,- merupakan belanja Modal BLUD yang terdiri dari belanja alat Kantor Rumah tangga sebesar Rp. 1.560.426.471,- alat kedokteran sebesar Rp. 2.045.966.670,89,- alat Studio dan Komunikasi Rp. 101.984.523,- alat pertanian Rp. 1.450.000,- sehingga mempengaruhi penambahan pada peralatan mesin.

Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Rp. 121. 541.914,- terdiri dari honor pejabat pengadaan IPAL sebesar Rp. 2.550.000,- dan belanja BLUD sebesar Rp. 118.991.914,-

Reklas keluar ke JIJ Rp. 12.177.000,- merupakan Pemasangan instalasi perangkat SIKDA Online Pada Puskesmas Halaban, Maek dan Koto Tinggi.

Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 58.096.606.562,67.

Penghapusan sebesar Rp. 84.000.000,-

Mutasi ke SEKDA sebesar Rp. 258.556.880 terdiri dari :

- Kendaraan Roda Dua yang telah diusulkan untuk penghapusan Rp. 111.250.000
- Kendaraan Roda Dua yang telah diusulkan untuk penghapusan Rp. 24.000.000
- Mutasi ke OPD Rp. 123.306.800,-

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.500.000,00 yang merupakan alat tenis meja tahun perolehan 2011. Reklas ini disebabkan karena adanya Kodefikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.2.3	Gedung dan Bangunan	89.031.880.947	83.589.296.695

Nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp. 89.031.880.947,- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 83.589.296.695,-.Terdapat penambahan nilai gedung bangunan sebesar Rp. 5.442.584.252,- yang terdiri dari :

a. Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2021 Rp. 6.363.731.522,-
- Reklas Masuk dari Aset Lainnya Rp. 20.000.000,-

b. Mutasi Kurang

- Reklas Keluar Rp. 185.833.788,-
- BM Tidak Dikapitalisir Rp. 47.379.350,-
- Penghapusan Rp. 707.934.132

Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp. 6.363.731.522,- terdiri dari :

1. Pembangunan Puskesmas Piladang	Rp. 5.079.765.712,-
2. Lanjutan Pembangunan Aula Pusk. M. Paiti	Rp. 147.991.980,-
3. Pemasangan Vabing Blok Pusk. Mungka	Rp. 29.064.424,-
4. Rehab Poskesri Jorong III Nagari Koto Bangun	Rp. 182.433.788,-
5. Rehab Poskesri Suka Karya Nagari Lubuak Alai	Rp. 98.848.137,-
6. Rehab Poskesri Alai Baru	Rp. 48.540.135,-
7. Rehab Poskesri Koto Tangah Nagari Koto Lamo	Rp. 98.770.008,-
8. Bangunan Tempat Sampah Medih Pusk. Bt Hampa	Rp. 827.000,-
9. Pemeliharaan Pustu dan Pusk G. Malintang	Rp. 15.894.000,-
Pengadaan tempat parkir Pusk. Koto Tinggi	Rp. 34.000.000,-
10. Pengadaan bermain anak dan menyusui	Rp. 14.000.000,-
11. Pengadaan Pembatas Pelayanan	Rp. 10.000.000,-
12. Pengadaan Tiang Bendera	Rp. 3.400.000,-
13. Renovasi Puskesmas Mungka	Rp. 130.668.480
14. Renovasi Puskesmas Mungo	Rp. 79.518.594
15. Tempat Parkir Ambulance Pusk. Pd. Kandis	Rp. 11.229.375
16. Tempat Parkir Pasien Pusk. Pk. Rabaa	Rp. 28.432.500
17. Pengadaan Bangunan TPS Sampah Medis	Rp. 9.993.198
18. Renovasi Puskesmas Situjuh	Rp. 79.556.582
19. Kanopi Parkiran Pusk. Suliki	Rp. 13.500.000
20. Tempat Parkir dan Pengecatan Pusk. Taram	Rp. 89.583.335
21. Renovasi Puskesmas Tj. Pati	Rp. 157.714.274
Jumlah	Rp

Reklas Masuk dari Aset Lainnya sebesar Rp. 20.000.000,- merupakan belanja dari BLUD yaitu pemasangan teralis Puskesmas Koto Tinggi.

Reklas Keluar ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 182.433.788,- merupakan Relokasi Poskesri Jorong III Bangun dan sebesar Rp. 3.400.000 reklas keluar ke peralatan mesin yaitu berupa pengadaan tiang bendera pada Puskesmas Koto Tinggi.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisir sebesar Rp. 47.379.350,- terdiri dari :

- Belanja Bangunan tempat sampah medis puskesmas. Batu Hampar berupa pemasangan kunci pada pintu tempat sampah medis tersebut sebesar Rp. 827.000,-
- Belanja pemeliharaan pada Puskesmas Gunung Malintang yang seharusnya terletak di belanja Operasional pada belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp. 15.894.000,-
- Pengecetan Puskesmas Taram yang seharusnya terletak pada belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp. 30.658.350,-

Penghapusan Puskesmas Piladang sesuai dengan SK Nomor Sebesar Rp. 707.934.132,-

Nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp. 83.589.296.695,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 71.670.995.340,-. Terdapat penambahan nilai gedung bangunan sebesar Rp. 11.918.301.355,- yang terdiri dari :

c. Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2020 Rp. 10.886.236.999,-
- Mutasi Tambah dari Dinas Kominfo Rp. 5.585.000,-
- Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya Rp. 1.127.174.356,-

Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. **10.886.236.999,-** terdiri dari :

22. Relokasi Puskesmas Baruah Gunung	Rp. 5.391.964.999,-
23. Relokasi Puskesmas Koto Tinggi	Rp. 5.393.577.000,-
24. Relokasi Poskesri Jorong III Bangun	<u>Rp. 100.695.000,-</u>
Jumlah	Rp 10.886.236.999,-

Mutasi Tambah dari Kominfo sebesar Rp. 5.585.000,- merupakan pemasangan kanopi tempat parkir pada gedung Ex. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pencatatannya masih berada di Dinas Kesehatan karena belum ada serah terima ke Dinas Komunikasi dan Informasi sampai akhir tahun 2020.

Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.741.594.800,- merupakan belanja dari BLUD yang terdiri dari :

- Renovasi Puskesmas Koto Baru Simalanggang Rp. 117.857.605,-
- Renovasi Puskesmas Dantung-dantung Rp. 197.365.000,-
- Bangunan Tempat Parkir Pusk. Maek Rp. 46.978.001,-
- Pengadaan Rumah Genset Pusk. Pangkalan Rp. 13.960.000,-
- Rehab Puskesmas Pangkalan Rp. 29.792.000,-
- Pengadaan Pegangan Tangga Pusk. Situjuh Rp. 6.074.250,-
- Rehab Puskesmas Taram Rp. 157.510.500,-
- Pengadaan Tempat Parkir, Kanopi & Partisi
Ruangan Pusk. Tanjung Pati Rp. 197.296.000,-
- Pembangunan Ruang TB & Rekam Medik
Pusk. Mungo Rp. 216.351.000,-

Reklas Keluar ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 105.695.000,- merupakan Relokasi Poskesri Jorong III Bangun dimana pembangunannya masih sampai Pondasi Bangunan.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	770.119.402	622.673.125

Terdapat penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 147.446.277,-. Yang terdiri dari

- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Tahun 2021 :
 1. Pembangunan TPS Sampah Medis Pusk. Sialang Rp. 21.273.262
 2. Pembangunan TPS Sampah Medis Pusk. Rimbo Data Rp. 21.205.265
 3. Pembangunan TPS Sampah Medis Pusk. Pd. Kandis Rp. 21.273.262
 4. Pembangunan TPS Sampah Medis Pusk. Maek Rp. 21.273.262
 5. Pembangunan TPS Sampah Medis Pusk. GM Rp. 21.273.262
 6. Pembangunan TPS Sampah Medis Pusk. Bj. Loweh Rp. 21.273.262
- Pengadaan Belanja Modal dari BLUD berupa :
 1. Pengadaan Jaringan Air Bersih Pusk. Kt. Tinggi Rp. 7.874.702
 2. Penutup Riol Puskesmas Rimbo Data Rp. 12.000.000

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	28.310.100,-	28.310.100,-

Tidak terdapat penambahan pada Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021. Adapun terdapat belanja dari Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 17.975.275,- yang merupakan belanja modal pengadaan aplikasi system pendaftaran pasien pada Puskesmas Tanjung Pati yang sudah di reklas keluar ke asset lainnya berupa software.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran I.E

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	318.178.788	135.745.000

Pada Tahun 2021 Kontruksi Dalam Pengerjaan bertambah sebesar Rp. 182.433.788 yang merupakan reklas masuk dari Gedung dan bangunan berupa rehab Poskesri Jorong III Nagari Koto Bangun.

Pada Tahun 2020 Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 135.745.000 yang terdiri dari :

Terdapat reklas masuk dari Gedung Bangunan sebesar Rp. 100.695.000,- yang merupakan Relokasi Poskesri Jorong III Koto Bangun.

Reklas keluar ke Gedung Bangunan sebesar Rp. 143.990.000 yang terdiri dari :

- DED Relokasi Puskesmas Baruah Gunung Rp. 139.865.000
- Honor Pokja Relokasi Pusk. Baruah Gunung Rp. 4.125.000

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(81.750.694.164,48)	(71.696.890.830,97)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(58.111.711.368,13)	(49.570.018.394,26)

Pada Tahun 2021 terdapat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (58.111.711.368,13). Terdapat penambahan dari tahun 2020 disebabkan adanya pengadaan peralatan mesin yang bersumber dari dana BLUD.

Pada Tahun 2020 terdapat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (49.570.018.394,26).

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.3.7.0 2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.523.497.971,19)	(22.035.746.727,88)

Pada Tahun 2021 terdapat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp. 23.523.497.971,19). Nilai tersebut mendapat penambahan dari nilai tahun 2020 disebabkan adanya pembangunan gedung dan bangunan pada tahun sebelumnya yang sudah dijadikan aset pada tahun 2021 dan nilai rehab gedung dan bangunan tahun 2021. Penyusutan juga termasuk dari dana BLUD dimana gedung induk bangunan terdapat pada Dinas Kesehatan, sementara itu belanja BLUD hanya belanja rehab gedung dan bangunan.

Pada Tahun 2020 terdapat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp. 22.035.746.727,88).

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JIJ	(115.484.825,16	(91.125.708,83)

Pada tahun 2021 terdapat akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp. 115.484.825,16). Nilai tersebut bertambah dari tahun 2020 dikarenakan masa manfaat berjalan pada Jaringan Irigasi dan Jalan bertambah.

Pada tahun 2020 terdapat akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp. 91.125.708,83).

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.3	ASET LAINNYA	1.771.689.197,68	1.871.853.982,18
5.2.3.1	Asset Lainnya (Peralatan Mesin yang rusak berat)	804.994.532	804.994.532

Pada tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat penambahan pada aset lainnya yaitu peralatan mesin yang rusak berat sebesar Rp. 804.994.532,00.

Nilai peralatan mesin yang rusak berat dapat ditunjukkan dengan bentuk fisiknya yang sudah tidak bisa terpakai / rusak berat dan berkurang dari tahun 2020 disebabkan karena kendaraan roda dua dan roda empat yang rusak berat telah diusulkan untuk penghapusan.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.F

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.3.2	Asset Tak Berwujud	304.886.275	286.911.000

Pada tahun 2021 aset tak berwujud sebesar Rp. 304.886.275 terdapat penambahan sebesar Rp. 17.975.275,- yaitu berupa aplikasi software pendaftaran pasien Puskesmas Tanjung Pati.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.G

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
Asset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		1.468.600.450,18	1.468.600.450,18
Tidak terdapat penambahan Pada asset tetap yang digunakan dalam operasional pemerintah pada tahun 2021 dan 2020.			

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		1.797.527,50	0

Terdapat Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.797.527,50 yang disebabkan karena adanya pengadaan aplikasi pendaftaran pasien pada Puskesmas Tanjung Pati.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		804.994.532	688.652.000

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp. 804.994.532,- merupakan nilai dari asset rusak berat/usang yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Pada tahun 2020 akumulasi penyusutan asset lain-lain sebesar Rp. 688.652.000,-

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.4	K E W A J I B A N	52.997.850	92.085.678

5.2.4.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga pada tahun 2021. Sedangkan Pada tahun 2020 utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 6.311.920,-

Utang Perhitungan Pihak Ketiga tersebut merupakan utang pajak yang belum disetorkan terdiri dari :

- Puskesmas Batu Hampar	Rp. 1.393.192,-
- Puskesmas Tanjung Pati	Rp. 3.011.814,-
- Puskesmas Suliki	Rp. 470.455,-
- Puskesmas Mungo	Rp. 1.185.000,-
- Puskesmas Baruah Gunung	Rp. 251.459,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.A.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.4.2	Utang Belanja Jasa	1.753.650	0

Terdapat utang belanja jasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.753.650,- yang terdiri dari :

- Tagihan Telepon	Rp. 52.000
- Tagihan Listrik	Rp. 453.650
- Tagihan Kawat/Faksimili/Internet	Rp. 1.248.000

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.4.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	51.244.200	85.774.200

Pada tahun 2021 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 51.244.200,- yang terdiri dari :

a. Utang Persalinan Puskesmas Tanjung Pati	Rp. 5.484.200,-
b. Utang Persalinan Puskesmas Muaro Paiti	Rp. 5.780.000,-
c. Utang Persalinan Puskesmas Sialang	<u>Rp. 39.980.000,-</u>
Jumlah	Rp. 51.244.200,-

Pada tahun 2020 terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 85.774.200,-

Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2.B

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.5	Ekuitas	102.548.684.225,42	98.570.257.901,27

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Asset dengan Jumlah Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 102.548.684.225,42 sedang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 98.570.257.901,27 .

Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2.C.

5.3 Laporan Operasional

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

- **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-

Tidak terdapat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2021 dan 2020.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18.170.898.610	19.301.271.195

Pada Tahun 2021 Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dana JKN, Layanan Umum, Non Kapitasi dan Pendapatan BLUD lainnya (Jasa Giro) yang dikelola oleh BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bulan Januari-Desember 2021 sebesar Rp. 18.170.898.610,-

Pada Tahun 2020 Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dana JKN yang dikelola oleh BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota dari Bulan Januari-Desember 2020 sebesar Rp. 19.301.271.195,-

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.3.1	Pendapatan Hibah	414.739.630	2.273.373.142

Terdapat Pendapatan Hibah berupa Pemberian Tambahan Makanan (PMT) pada tahun 2021 sebesar Rp. 414.739.630 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (BAST Terlampir).

• **BEBAN OPERASI**

Jumlah berikut merupakan beban pegawai dalam tahun anggaran 2021. Jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.01	Beban Pegawai LO	63.689.533.012,00	56.722.688.734,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	49.801.029.642,00	45.960.642.971,00
	Beban Gaji Pokok ASN	38.932.489.260,00	31.103.504.400,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	3.613.171.764,00	2.887.637.588,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	210.140.000,00	187.825.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.607.940.000,00	2.877.417.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	608.625.000,00	449.835.000,00
	Beban Tunjangan Beras ASN	2.459.890.140,00	1.951.501.740,00
	Beban Tunjangan PPh / Khusus ASN	43.145.420,00	30.862.952,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	584.970,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.968.240,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	80.247.295,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	239.827.553,00	298.536.074,00
	Beban Gaji Ketiga Belas	0,00	3.117.861.228
	Beban Tunjangan Hari Raya	0,00	3.055.661.989

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.970.936.370,00	10.406.833.988,00
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	8.570.129.064,00	8.236.450.972,00
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.400.807.306,00	2.170.383.016,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	8.079.814.171,37
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	8.079.814.171,37
	Beban Honorarium	1.349.535.000,00	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	1.568.032.000,00	355.211.775,00
	Beban jasa Pegawai Non PNS BLUD (Pegawai-BL)	1.568.032.000,00	355.211.775,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	45.113.660.781,74	46.376.169.097,30

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2021.
Jumlah realisasi beban barang dan jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.01	Beban Persediaan	7.857.744.274,82	8.097.688.857,93

Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
Sisa Persediaan di Neraca Awal TA 2021	6.452.774.594,22	5.427.553.054,15
Beban Persediaan TA 2021	9.074.641.179,00	6.848.296.006
PMT	0,00	631.662.480
Alat Kedokteran		0,00
Cetak Brosur		29.311.250
Hibah Untuk Covid (APD/BMHP)		1.613.640.662,00
Sisa Persediaan di Neraca Akhir TA 2021	7.660.823.098,40	6.452.774.594,22
Beban Persediaan	7.857.744.274,82	8.097.688.857,93

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	9.038.862.779,00	9.568.842.034,00
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	16.142.450,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	622.724.198,00	373.774.408,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.410.000,00	13.030.000,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	46.343.000,00	42.600.000,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.939.598.590,00	0,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.750.000,00	0,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	429.316.909,00	1.614.287.039,00

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	199.944.043,00	590.703.937,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	82.326.684,00	190.453.723,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	789.886.426,00	890.743.562,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	822.782.069,00	584.908.781,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	33.922.000,00	52.417.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	58.009.630,00	43.589.727,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	0,00	9.502.400,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	204.624.133,00	214.320.383,00
Beban Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul-umbul, Lambang Negara	0,00	136.505.010,00
Belanja Obat-Obatan - Obat	1.574.601.011,00	2.762.904.853,00
Belanja Obat-Obatan – Obat Lainnya	37.500.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	820.991.880,00	361.769.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.948.100,00	3.188.700,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	235.231.106,00	785.070.500,00

Beban Makanan dan Minuman	49.353.000,00	0,00
Aktivitas Lapangan		
Beban Bahan Makanan Pokok	0,00	354.999.145,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.600.00,00	324.390.992,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	35.601.400,00	0,00
	Beban Komponen-komponen Rambu-Rambu	35.601.400,00	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.02	Beban Jasa	34.585.393.492,92	33.783.707.148,37

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	21.163.222.652,92	11.690.823.908,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.985.500,00	0,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.710.000,00	1.714.949.499,00
	Beban Jasa Tenaga Pendidik	11.207.552.946,92	0,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.816.502.860,00	1.969.286.505,00
	Beban Jasa Laboratorium	59.000.000,00	7.850.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	53.700.000,00	29.900.000,00

Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	116.250.000,00	1.189.064.915,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	10.400.000,00	102.870.725,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	199.354.000,00	527.979.972,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	640.210.000,00	194.940.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	143.940.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	93.002.346,00	21.255.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	7.010.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	242.089.697,00	65.694.280,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	500.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	8.593.375,00	11.454.007,00
Beban Tagihan Air	61.615.332,00	42.104.220,00
Beban Tagihan Listrik	358.995.237,00	353.420.462,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	3.360.000,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	128.726.454,00	156.862.019,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.955.800,00	354.000,00
Beban Lembur	117.697.000,00	0,00
Beban Medical Check Up	2.241.000,00	0,00
Beban Jasa Penggantian Transportasi	0,00	20.100.000,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	412.500.000,00	0,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.350.021.105,00	5.272.368.304,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.583.603.440,00	11.934.630.600,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.582.933.300,00	11.934.630.600,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	670.140,00	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	18.300.000,00	4.560.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	800.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	9.200.000,00	3.760.000,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	9.100.000,00	

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	45.600.000,00	89.025.000,00
	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	57.000.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	15.500.000,00
	Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	16.525.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	45.600.000,00	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.718.543.750,00	0,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	649.850.450,00	0,00
	Beban Sosialisasi	2.060.185.800,00	0,00
	Beban Bimbingan Teknis	8.507.500,00	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	443.586.410,00	335.756.456

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240.926.719,00	134.391.444,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.446.300,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	99.589.195,00	0,00
	Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	35.803.800,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	81.805.474,00	0,00

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.642.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	29.496.750,00	40.915.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.610.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.975.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.362.000,00	57.672.144,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.225.391,00	149.772.260,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	183.225.391,00	149.772.260,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.434.300,00	71.167.822,00
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	9.434.300,00	71.167.822,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	16.228.730,00
	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	10.000.000,00	16.228.730,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.226.936.604,00	4.159.016.635,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	884.746.604,00	3.949.590.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.342.190.000,00	209.426.635,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
8.1.02.05	Beban Uang dan/Atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.900.000,00	0,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	88.900.000,00	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Beban Lain-lain	367.778.151,00	440.157.954,96
	BM Tidak dikapital / PM	50.347.621	121.541.914,00
	Mutasi Ekstrakom	270.051.180	265.353.978,85
	BM Tidak Dikapital /GB	47.379.350	53.262.062,11
	Hibah dari Kemenkes Tdk dikapital		0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Beban Penyusutan	10.171.943.393,01	10.551.114.358,44

Beban Penyusutan Tahun 2021 merupakan beban penyusutan Aset Tetap pada tahun berjalan yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan Mesin sebesar Rp. 8.541.692.973,87 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.487.751.243,31 dan JIJ sebesar Rp. 24.359.116,33, Aset lain Rusak Berat sebesar Rp. 116.342.532,- dan Amortisasi Aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.797.527,50

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Beban Penyisihan Piutang	(1.214.960,90)	(1.773.742,50)

Pada tahun 2021 terdapat beban penyisihan piutang sebesar (Rp. 1.214.960,90). Beban Penyisihan piutang tersebut merupakan beban penyisihan dari piutang retribusi Klaim Non Persalinan Tahun 2021.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Ekuitas Awal	98.570.257.901,27	81.902.445.006,47

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 98.570.257.901,27 yang terdiri dari ;

1.	Jumlah Asset Lancar	11.838.795.956,35	8.714.721.108,15
2.	Jumlah Asset Tetap	84.951.693.640,74	71.018.319.725,14
3.	Jumlah Asset Lainnya	1.871.853.982,18	2.996.963.482,18
4.	Jumlah Kewajiban	92.085.678,00	827.559.309,00
5.	Jumlah Ekuitas	98.570.257.901,27	81.902.445.006,40

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Surplus/Defisit-LO	(100.756.062.136,85)	(92.517.259.550,20)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **(100.756.062.136,85)**.

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **(92.517.259.550,20)**.

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	R/K PPKD	105.305.534.015,00	108.254.798.896,00

R/K PPKD merupakan selisih antara R/K (M) sebesar Rp. 0,- dan R/K (K) PPKD sebesar Rp. **105.305.534.015,00,-**

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Dampak Kumulatif	(571.045.554)	930.273.549
	Perubahan Kebijakan		
	/Kesalahan Mendasar		

Terdiri dari :

- Koreksi Hutang PFK	6.311.478,00	0,00
- Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Lalu	0,00	215.650,00
- Barang yang akan diserahkan Masyarakat	0,00	1.719.109.800,00
- Mutasi Tambah Aset Tetap	134.473.350,00	(258.556.880,00)
- Mutasi Kurang Aset Tetap	(3.000.000,00)	(436.457.500,00)
- Penghapusan	(707.934.132,00)	(84.000.000,00)
- Koreksi Kurang Ekstrakomp	0,00	2.792.00,00
- Koreksi Ekuitas BLUD – Audit BPK	0,00	(12.829.521,00)
- Koreksi Aset	(896.250,00)	0,00

No.	Perkiraan	Tahun 2021	Tahun 2020
	Ekuitas Akhir	102.548.684.225,42	98.570.257.901,27

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 102.548.684.225,42 yang terdiri atas :

1. Jumlah Asset Lancar	13.641.293.663,51	11.838.795.956,35
2. Jumlah Asset Tetap	87.188.699.214,23	84.951.693.640,74
3. Jumlah Asset Lainnya	1.771.682.075,42	1.871.853.982,18
4. Jumlah Kewajiban	52.997.850,00	92.085.678,00
5. Jumlah Ekuitas	102.548.684.225,42	98.570.257.901,27

BAB. VI.

PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan lingkungan sehat.

Dalam rangka anggaranaan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, perlu adanya fasilitas serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang Kesehatan.

Pengelolaan Bidang Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2011 maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan juga diatur dengan Peraturan Bupati Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kesehatan Kab.Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Perencanaan

Bidang Pelayanan Kesehatan dengan seksi :

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan seksi :

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Seksi Surveillance Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan
- Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza

Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan seksi :

- Seksi Pelayanan Kefarmasian dan Obat Publik
- Seksi Alat Kesehatan dan Fasyankes
- Seksi SDM Kesehatan dan Diklat

Bidang Kesehatan dan Masyarakat dengan seksi :

- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan
- Seksi Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

BAB. VII

P E N U T U P

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Untuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun realisasi atas Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 18.413.890.790,- atau 98,10 % dgn perincian sbb :

Jenis Pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Lain-lainn PAD Yang Syah	18.770.942.075	18.413.890.790	98,10
Jumlah	18.770.942.075	18.413.890.790	98,10

- Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 122.883.198.382,92,- atau 82,30 % dengan perincian sbb :

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan ada beberapa belanja yang tidak tercapai sesuai dengan target indicator kinerja hal ini disebabkan antara lain :

- Kurangnya personil / staf yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga mengganggu percepatan proses pelelangan Barang dan Jasa.
- Beberapa pengalihan belanja yang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tidak disahkan.

